1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Natuna selama periode Juli sampai dengan September 2026 secara umum menunjukkan kondisi yang relatif terkendali, meskipun masih terdapat beberapa komoditas yang mengalami fluktuasi harga. Berdasarkan pemantauan harga pada 17 kecamatan, komoditas yang perlu menjadi perhatian TPID terutama meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabai dan bawang.

Berikut daftar harga barang kebutuhan pokok dan penting pada triwulan III di Kabupaten Natuna:

No	Komoditi	April	Mei	Juni	Perubahan Harga (%)
1	Beras Premium	17,000	17,000	17,000	-
2	Beras SPHP	13,460	12,420	13,460	-
3	Gula	17,714	17,857	17,786	0.00
4	Minyak Goreng	20,929	21,214	21,500	0.03
5	Tepung Terigu	15,286	15,214	15,214	- 0.00
6	Daging	141,429	141,429	141,429	-
7	Telur Ayam Ras	58,286	57,571	57,571	- 0.01
8	Cabe Merah	71,385	71,615	81,385	0.12
9	Bawang Merah Jawa	44,929	43,643	43,929	- 0.02
10	Bawang Merah India	24,600	25,400	28,200	0.13
11	Bawang Putih	40,929	41,714	42,214	0.03
12	Kacang Kedelai	13,333	13,333	13,500	0.01

Beras sebagai komoditas pangan utama masyarakat menunjukkan perkembangan harga yang relatif stabil selama periode pengamatan. Harga beras medium/premium yang tercatat pada berbagai merek umumnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sebagai contoh, harga rata-rata beras Anak Mantap tetap sebesar Rp17.000/kg pada Juli, Agustus dan September. Beras Bulog SPHP juga relatif stabil pada kisaran Rp13.400/kg. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasokan beras di Kabupaten Natuna selama periode pengamatan masih relatif terjaga.

Gula pasir menunjukkan kecenderungan meningkat secara terbatas. Harga rata-rata gula pasir tercatat sekitar Rp17.714/kg pada Juli, meningkat menjadi Rp17.857/kg pada Agustus dan kemudian berada pada kisaran Rp17.786/kg pada September. Dengan demikian, meskipun terdapat fluktuasi antarbulan, pergerakan harga gula pasir masih dalam rentang yang relatif terbatas.

Minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian lebih karena menunjukkan kecenderungan kenaikan pada September. Harga rata-rata Minyak Kita ukuran 1 liter meningkat dari sekitar Rp20.929/liter pada Juli menjadi Rp21.214/liter pada Agustus dan Rp21.500/liter pada September. Kenaikan yang relatif kecil tetapi terjadi secara bertahap ini perlu dipantau karena minyak goreng merupakan komoditas konsumsi harian

masyarakat. Pada saat yang sama, terdapat variasi harga yang cukup lebar antarwilayah, terutama pada kecamatan kepulauan.

Daging sapi relatif stabil. Pada Juli, harga rata-rata daging sapi murni tercatat sekitar Rp141.429/kg dan pada periode berikutnya tidak menunjukkan perubahan berarti. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga daging sapi belum menjadi sumber tekanan harga yang besar selama periode pengamatan. Namun demikian, karena komoditas ini sebagian besar bergantung pada pasokan dari luar daerah, risiko kenaikan tetap perlu diantisipasi apabila terjadi gangguan distribusi atau peningkatan permintaan.

Telur ayam ras relatif stabil dan bahkan menunjukkan kecenderungan sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Harga rata-rata telur ayam broiler tercatat sekitar Rp58.286/papan pada Juli, Rp57.571/papan pada Agustus, dan Rp57.571/papan pada September. Dengan demikian, telur ayam belum menunjukkan tekanan harga yang berarti pada akhir periode pelaporan.

Berbeda dengan komoditas pangan pokok lainnya, **cabai** menunjukkan fluktuasi yang lebih tinggi. Harga cabai merah rata-rata tercatat sekitar Rp71.385/kg pada Juli, meningkat menjadi Rp75.615/kg pada Agustus, dan kembali meningkat menjadi sekitar Rp81.385/kg pada September. Cabai hijau juga mengalami peningkatan dari sekitar Rp80.417/kg pada Juli menjadi Rp92.917/kg pada September. Sementara itu, cabai rawit bergerak dari sekitar Rp88.000/kg pada Juli, meningkat pada Agustus, dan berada pada kisaran Rp97.308/kg pada September. Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa cabai menjadi salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian TPID karena memiliki volatilitas harga yang lebih tinggi.

Bawang juga menunjukkan variasi harga antarjenis dan antarwilayah. Pada September, rata-rata harga bawang merah India berada sekitar Rp28.200/kg, bawang merah Jawa sekitar Rp43.929/kg, sedangkan bawang putih sekitar Rp42.214/kg. Dibandingkan bulan sebelumnya, beberapa jenis bawang mengalami kenaikan terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa komoditas bawang perlu tetap dimonitor, khususnya karena pasokannya sangat dipengaruhi oleh distribusi antardaerah.

Secara keseluruhan, perkembangan harga kebutuhan pokok sampai dengan September 2026 dapat dikategorikan **relatif terkendali**, terutama untuk beras, daging ayam, daging sapi dan telur. Namun, tekanan harga lebih terlihat pada komoditas **cabai, bawang dan minyak goreng**, sehingga ketiga kelompok komoditas tersebut perlu menjadi prioritas pemantauan TPID pada periode berikutnya.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan III tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Natuna menghadapi beberapa permasalahan dalam Pengendalian Inflasi Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Kabupaten Natuna Bukan Daerah Penghasil.

   Kabupaten Natuna merupakan daerah terluar dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi geografis yang tersebar memiliki tantangan dalam Pengendalian Inflasi Daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar daerah seperti Tanjungpinang,

Batam, Jakarta dan Pontianak Kalimantan Barat. Kondisi geografis tersebut menyebabkan harga pangan dan barang kebutuhan strategis di Kabupaten Natuna sangat rentan terhadap gangguan distribusi, tingginya biaya logistik, serta faktor cuaca yang kerap memengaruhi kelancaran pasokan.

2. Kapasitas penyimpanan

   Untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan, kebutuhan pokok masyarakat maka diperlukan dukungan infrastruktur berupa gudang disetiap Kecamatan di Kabupaten Natuna untuk mengantisipasi kendala ketersedian pasokan ketika terjadi gangguan dalam pendistribusian barang dari daerah asal akibat jangka waktu pengiriman yang lama ataupun karena faktor cuaca.

3. Kabupaten Natuna tidak termasuk daerah sentra produksi pangan strategis dimana hampir sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat masih dipasok dari luar daerah, sementara produksi lokal hanya terbatas pada beberapa komuditas tertentu dalam skala kecil seperti cabai dan hortikultura rumah tangga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan III Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan berbagai kebijakan dan langkah strategis pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Pelaksanaan kebijakan difokuskan pada empat pilar utama, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pasokan.

   Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui:

   - Penguatan koordinasi dengan daerah pemasok utama seperti Batam dan Tanjungpinang dan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat untuk menjamin kontinuitas pasokan pangan strategis.
   - Bupati Natuna menyerahkan bantuan pupuk bersubsidi kepada para perwakilan kelompok tani yang berada di kecamatan Bunguran Timu,Bunguran Tengah, Bunguran Timur Laut, Bunguran Selatan, Bunguran Batubi, Bunguran Utara, Serasan dan Serasan Timur sebanyak 394,88 Ton baru terealisasi 188, 53 Ton yang diserahkan secara bertahap melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna.
   - Melaksanakan Koordinasi terkait Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan penting di beberapa Kecamatan dan Pengawasan Bahan Pokok dan penting.
   - Pasokan dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Kabupaten Natuna Bulan Juli sampai dengan September 2026 terpantau dalam kondisi aman dan mencukupi, serta harga relatif stabil meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami fluktuasi namun masih dalam batas wajar.
   - Monitoring dan Koordinasi BBM di beberapa Kecamatan pada bulan Juli dan

September 2026.
- Rapat koordinasi penyaluran LPG Non PSO 12 KG yang dilaksanakan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, Dinas PM PTSP Kabupaten Natuna, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Natuna, Kejaksaan Negeri Natuna, Sales Area Maneger PT. Pertamina Wilayah Provinsi Kepri dan Pelaku Usaha yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2026.
- Bupati Natuna melakukan pemantauan kedatangan Minyak Goreng Minyak kita dari Pusat melalui TOL Laut sebanyak 90.000 liter dan bulan depan akan datang lagi sebanyak 90.000 liter dengan harga sesuai HET yaitu Rp.15.700 yang dilaksanakan oleh Buolg Natuna.

2. Keterjangkauan Harga.

   Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, kebijakan yang dilaksanakan meliputi:

   - Bupati Natuna langsung mengikuti kegiatan Gerakan Pasar Murah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2026 di kecamatan Bunguran Barat dengan menyiapkan 1 Ton Minyak Goreng dan 1 Ton Gula Pasir dalam mengantipasi kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
   - bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan air minum dan meningkatkan kualitas, kuantitas serta kontinuitas pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna perlu dilakukan penyesuaian tarif air dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, prinsip keadilan dan menutup biaya operasional yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2-320 Tahun 2026 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna.
   - Pengawasan harga di pasar tradisional dan swalayan serta toko-toko untuk mencegah lonjakan harga yang tidak wajar.
   - Surat Edaran Bupati Natuna Nomor 600.1.4.3/0568/UM-SETDA/X/2026 tentang Pemanfaatan Embung Sebayar dalam kondisi krisis air.
   - Fasilitasi stabilisasi harga komoditas tertentu melalui intervensi pasar bekerja sama dengan Bulog dan distributor.
   -

3. Kelancaran Distribusi

   Untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan menekan biaya logistik, Pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan:

   - Koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan dan pelaku usaha transportasi laut guna mengantisipasi gangguan distribusi akibat kondisi cuaca ekstrem dan libur sekoah.
   - Pemantauan arus distribusi barang dari daerah pemasok ke pasar-pasar di Kabupaten Natuna.
   - Upaya percepatan distribusi barang kebutuhan pokok pada saat terjadi keterlambatan pasokan akibat faktor alam.
   - Kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok di Kabupaten Natuna didukung oleh tersedianya berbagai moda transportasi laut, baik melalui kapal angkutan milik pelaku usaha, KM. Bukit Raya, kapal RORO, maupun program Tol Laut. Ketersediaan dan keterhubungan moda transportasi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kontinuitas pasokan serta mendukung stabilitas harga dan

ketersediaan barang kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Natuna.Kelancaran Distribusi.

4. Komunikasi Efektif.

Dalam mendukung efektivitas pengendalian inflasi, TPID Kabupaten Natuna memperkuat aspek komunikasi melalui:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Minyak Goreng dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan pasokan yang dilaksanakan pada Tanggal 27 Juli 2026. Dimana harga Minyak Goreng Minyak Kita mengalami kenaikan yang tinggi dari harga Rp. 15.700 menjadi Rp. 21.000.
- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Sales Area Maneger (SAM) Wilayah Provinsi Kepri yang dipimpin oleh Bupati Natuna dalam rangka komunikasi untuk memperkuat ketahan energi terutama dalam penyaluran BBM di seluruh Kecamatan.
- Rapat Monitoring penyediaan, pendistribusian BBM jenis JBT dan JBKP di Wilayah Kabupaten Natuna yang dipimpin oleh Bupati Natuna dengan mengundang Komite BPH Migas yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2026.
- Pelaksanaan koordinasi TPID untuk pelaksanaan Bazar Pangan Murah dan Operasi Pasar Murah serta mengevaluasi perkembangan harga dan pasokan yang dilaksanakan di beberapa Kecamatan.
- Penguatan Data & Statistik Dashboard inflasi berbasis data TPID yang disampaikan setiap hari pada Website Kemendagri https://wasinflasi.kemendagri.go.id/login 20 komoditas utama.
- Penyampaian informasi harga dan ketersediaan barang kepada masyarakat melalui media informasi daerah.
- Edukasi kepada masyarakat terkait pola konsumsi bijak dan pemanfaatan produk lokal.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rapat Koordinasi yang dilakukan tim TPID sudah sangat baik namun perlu dimaksimalkan. Pemerintah Daerah perlu memperkuat sinergi dengan seluruh pihak baik TNI, Polri, lembaga BUMD, BUMN dan pengusaha untuk bekerja sama dalam menekan inflasi daerah.
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Lokal dengan meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan serta meningkatkan penangkapan ikan, dan budidaya ikan. Masyarakat perlu dilakukan pendampingan untuk meningkatkan hasil pertanian dan perikanan, baik budidaya maupun tangkap.
3. Perlu dilakukan kerjasama dengan daerah lain untuk menampung hasil pertanian dan nelayan agar masyarakat memiliki daya dorong untuk semakin maju lagi dalam meningkatkan hasil pertanian dan perikanan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Penguatan Koordinasi Distribusi Antarwilayah.

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memperkuat koordinasi distribusi barang kebutuhan pokok antar kabupaten/kota, terutama dari daerah surplus ke Kabupaten Natuna, guna menjamin kelancaran pasokan dan stabilitas harga.

2. Dukungan Subsidi Transportasi dan Logistik.

   Pemerintah Provinsi dan Pusat diharapkan dapat memberikan dukungan subsidi transportasi laut/logistik untuk komoditas pangan strategis menuju wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Kabupaten Natuna, guna menekan biaya distribusi dan disparitas harga melalui subsidi angkutan laut.

3. Penguatan Peran Bulog di Daerah Terpencil.

   Diharapkan kepada Pemerintah Pusat melalui Bulog untuk membangun gudang di beberapa Kecamatan terluar di Kabupaten Natuna seperti Serasan, Subi dan Pulau Laut dikarenakan kondisi geografis Natuna yang terdiri atas Pulau-pulau sehingga terbatasnya fasilitas penyimpanan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan pokok diwilayah perbatasan.

4. Peningkatan Infrastruktur Logistik dan Transportasi.

   Diperlukan percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi laut, pelabuhan, dan fasilitas logistik pendukung di wilayah Natuna guna memperlancar distribusi barang dan menurunkan biaya logistik.

5. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat mengalokasikan dukungan dana melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau untuk pembangunan fasilitas Cool Storage (pendingin dan penyimpanan) dalam menjaga kualitas hasil perikanan, pertanian maupun pangan segar lainnya tetap awet dan tidak cepat rusak.
6. Pemerintah Pusat diharapkan dapat mengintegrasikan Kabupaten Natuna ke dalam program nasional ketahanan pangan dengan pendekatan berbasis potensi lokal, sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi secara bertahap.
7. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait agar dapat melakukan kebijakan penurunan harga tiket pesawat menuju dan keluar Kabupaten Natuna, mengingat sangat tingginya harga tiket pesawat yang mencampai Rp. 2.800.000, sangat berdampak pada mahalnya biaya distribusi barang dan jasa sehingga berpotensi memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok.